

**“UNDANG-UNDANG BAHASA”:  
SEBUAH INSTRUMEN BAGI PEMBINAAN BAHASA DALAM ERA  
GLOBALISASI\*)**

**E. Zaenal Arifin\*\*)**

**Universitas Indraprasta PGRI**

[zaenalarifin\\_48@yahoo.com](mailto:zaenalarifin_48@yahoo.com)

[zaenalarifin.28@wordpress](http://zaenalarifin.28.wordpress)

**ABSTRAK**

Pasal dan ayat tentang bahasa dan sastra dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24, Tahun 2009 bernuansa sangat penuh harapan dalam pembinaan bahasa masa teknologi informasi ini. Namun, pelaksanaan Pembinaan Bahasa pada Era Globalisasi menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat. Bahkan, pasal dan ayat tertentu dilanggar sendiri oleh seorang presiden yang notabene menandatangani sendiri undang-undang tersebut. Badan Bahasa mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk membuat aturan hukum berupa perda, perwako, dan pergub tentang pengendalian bahasa di ruang publik. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional jika dimulai dari masyarakat Indonesia sendiri. Para pemimpin Indonesia harus lebih mencintai bahasanya daripada bahasa asing, dan memainkan peran sebagai bahasa internasional di dalam maupun di luar negeri melalui lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

**Kata Kunci: Undang-Undang Bahasa, era globalisasi, peraturan daerah, ruang publik, bahasa internasional**

**ABSTRACT**

*Article and section on the language and literature in the Indonesia Language Act 24 of 2009 has a very hopeful nuance in the development of this era of information technology. However, the implementation of Language Development in the Globalization Era faces a very serious challenge. In fact, certain articles and sections are violated by a president who actually signed his own act. The Language Agency invites all stakeholders in the regions to make legal arrangements in the form of district regulation, mayor regulation, and governor regulation on language control in the public sphere. Indonesian can become an international language if started from the people of Indonesia itself. Indonesian leaders should love their language more than foreign languages, and play the role of international language at home and abroad through the United Nations.*

**Key Words: language Act, globalization era, district regulation, public sphere, international languages**

## PENDAHULUAN

Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan menandatangani Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada bulan Oktober 2009. Jadi, sebenarnya posisi bahasa Indonesia di negeri tercinta ini seharusnya sangat kuat karena ada produk hukum khusus tentang bahasa yang harus diwujudkan oleh semua orang Indonesia dan pemerintah, yaitu UU Nomor 24, Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Secara garis besar, “Undang-Undang Bahasa” terdapat dalam Bab III UURI No. 24/2009, yang terdiri atas 21 pasal, yaitu Pasal 25 hingga Pasal 45, dan terdiri atas 43 ayat. Semua pasal dan ayat dalam “Undang-Undang Bahasa” ini sangat ideal dan penuh harapan yang membanggakan jika dapat dilakukan oleh semua warga Indonesia. Namun, dalam implementasinya terdapat banyak tantangan yang menghambat.

## PEMBAHASAN

### Sumpah Pemuda

Bab yang mengatur kebahasaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24/2009 adalah Bab III tentang Bahasa. Pasal 25, Ayat (1) berbunyi, Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Naskah Putusan Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 itu berisi tiga butir kebulatan tekad sebagai berikut.

*Pertama: Kami poeta dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah yang satoe, tanah Indonesia.*

*Kedua : Kami poeta dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa yang satoe, bangsa Indonesia.*

*Ketiga : Kami poeta dan poetri Indonesia menjoenjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.*

Pernyataan pertama adalah *pengakuan* bahwa pulau-pulau yang bertebaran di lautan di wilayah bekas kekuasaan Hindia-Belanda merupakan wilayah Republik Indonesia. Pernyataan kedua adalah *pengakuan* bahwa manusia yang menempati bumi Indonesia itu juga merupakan satu kesatuan yang disebut bangsa Indonesia. Pernyataan ketiga tidak merupakan pengakuan “berbahasa satu”, tetapi merupakan *pernyataan tekad kebahasaan* yang menegaskan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia (Halim, 1983: 2—3; Arifin dan Tasai, 2009:7).

Kadang-kadang kita menyaksikan bahwa siswa/siswi SD/MI, SMP/MTs., SMA/MA, dan SMK, dalam upacara Senin pagi mengucapkan pernyataan Sumpah Pemuda butir ketiga seperti berikut,

***Ketiga: Kami putra dan putri Indonesia mengaku  
berbahasa satu, bahasa Indonesia.***

Bunyi ikrar ke-3 Sumpah Pemuda seperti itu secara faktual jelas salah karena seakan-akan di Indonesia hanya ada satu bahasa yang diakui, yaitu bahasa Indonesia. Bunyi seperti itu samasekali tidak benar karena menyiratkan bahwa seakan-akan bahasa-bahasa daerah di Indonesia, tidak diakui keberadaannya. Secara yuridis, bunyi di atas juga keliru karena tidak sesuai dengan bunyi otentik yang tercantum dalam butir ke-3 Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

Untuk lebih memahami alasan filosofis butir ketiga "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia", marilah kita melihat suasana perdebatan yang berkembang dalam penutupan sidang Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, yang diselenggarakan di Gedung Oost-Java Bioscoop (sekarang Musium Sumpah Pemuda) di Jalan Kramat, daerah Senen. Ketua Sidang adalah Sugondo Joyopuspito, seorang pemuda mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum yang baru berusia 21 tahun. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Ketika itu, para pemuda pilihan dari seluruh Indonesia, antara lain Jong Java, Jong Madura, Jong Bugis, Jong Minahasa, Jong Bataks Bond, Jong Minang, Jong Aceh, Jong Ambon, Jong Islamieten Bond, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, dan lain-lain yang berjumlah lebih dari 400 orang sudah hampir menyepakati draf pertama redaksi butir ke-3 Sumpah Pemuda, yang berbunyi *Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia*. Ketika palu pimpinan sidang hampir diketukkan, tiba-tiba seorang pemuda berdarah Minang, kelahiran Bukittinggi secara mengejutkan peserta sidang, mengangkat tangan menyampaikan interupsi. Kira-kira dialognya begini.

"Interupsi Saudara Ketua", kata sang pemuda.

"Ada apa," kata Ketua Sidang, Sugondo Joyopuspito, "ya silakan".

"Begini Saudara Ketua, "Mohon dipertimbangkan lagi bunyi redaksi butir ketiga karena ini berbahaya untuk kehidupan masa depan bangsa kita."

Semua peserta sidang kaget dan terperanjat dengan pernyataan seorang peserta tersebut.

"Silakan, bagaimana redaksi yang tepat menurut Saudara, dan berikan alasannya."

"Terima kasih", kata pemuda tersebut. "Begini Saudara Ketua dan semua peserta sidang". Menurut saya, redaksi yang tepat adalah *Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia*."

Kata Ketua Sidang, "Ah, kalau seperti itu sama saja."

"Oh jelas tidak," kata pemuda tersebut.

"Coba berikan alasan Saudara", kata ketua sidang.

"Begini alasannya," kata pemuda tadi, *Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia*, artinya seakan-akan di Indonesia hanya ada satu bahasa yang diakui, yaitu bahasa Indonesia. Ini sangat berbahaya karena menyiratkan bahwa seolah-olah bahasa-bahasa daerah di Indonesia, tidak diakui keberadaannya. Bagaimana nasib bahasa saya di kemudian hari, apakah bahasa saya, yaitu bahasa Minang harus dicampakkan, apakah bahasa Minang harus dilenyapkan."

Ketua Sidang bertanya kepada semua peserta tentang pendapat si pemuda

tersebut. Akhirnya, secara aklamasi semua peserta sidang menyepakati redaksi yang diusulkan sang pemuda tadi. Siapa nama pemuda itu. Dia adalah Muhammad Yamin, mahasiswa Fakultas Hukum Tingkat I.

Kita harus berterima kasih kepada pemuda berdarah Minang, kelahiran Bukittinggi yang berotak cemerlang atau brilian, Muhammad Yamin. Beliau telah menorehkan tinta emas dan merumuskan butir ketiga dengan jitu, *Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia*. Artinya, kita bangsa Indonesia mengakui keberadaan bahasa-bahasa daerah yang dipelihara oleh penuturnya, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia di atas bahasa-bahasa daerah tersebut. Andaikata draf pertama ikrar tersebut tidak dikoreksi oleh Muhammad Yamin, dan masuk ke dalam Undang-Undang No. 24/2009 ini, sudah dapat diduga bahwa kelak yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa akan ditilang (oleh polisi) karena bahasa Jawa tidak diakui keberadaannya, dan melanggar undang-undang. Warga yang menggunakan bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa Minang, dan bahasa daerah yang lain dalam berkomunikasi dengan sesamanya pasti ditilang karena bahasa-bahasa daerah itu tidak diakui keberadaannya, dan tentu dianggap melanggar undang-undang. Saya menganalogikan hal tersebut dengan pemberlakuan Undang-Undang Lalu Lintas. Pengendara yang mengemudikan mobil di sebelah kanan, pasti ditilang. Orang yang mengemudi tidak bisa memperlihatkan SIM kepada petugas, orang tersebut pasti ditilang karena melanggar undang-undang. Atas jasa dan pemikiran yang sangat brilian, kira-kira dua puluh lima tahun kemudian pada tahun 1950-an, Muhammad Yamin diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Soekarno.

Menurut Prof. Dr. Anton M. Moeliono dan Prof. Dr. Multamia Lauder dari Universitas Indonesia, bahasa daerah di Indonesia berjumlah 746 buah. Ibu Multamia, kemudian, membuat hipotesis berikut: “**Makin ke timur jumlah bahasa daerah makin banyak**”, seperti di Papua kira-kira 250 bahasa daerah dan di Maluku kira-kira 200 bahasa daerah, “**tetapi penuturnya sedikit**”, yaitu masing-masing kira-kira 150—500 orang. “**Makin ke barat, jumlah bahasa daerah makin sedikit, tetapi penuturnya banyak**”. Misalnya, di Pulau Jawa hanya ada empat bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan bahasa Betawi, **tetapi jumlah penuturnya banyak, misalnyapenutur bahasa Jawa kurang lebih 80.000.000 orang; penutur bahasa Sunda kurang lebih 50.000.000 orang, serta penutur bahasa Madura dan bahasa Betawi masing-masing kira-kira berjumlah 10.000.000 orang.**(Lihat Alwi dalam Alwi, 2000)

### **Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia**

Prof. Dr. B.J. Habibie, sebagai Presiden Ke-3 Republik Indonesia, dalam sambutannya pada Kongres VII Bahasa Indonesia 1998 mengatakan bahwa kita patut bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa yang telah menyatukan kita semua berkat adanya bahasa nasional, bahasa Indonesia. Jika dibandingkan dengan beberapa bangsa di Benua Asia, kemajuan yang dicapai oleh bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara, sungguh luar biasa. Masih

banyak negara di Benua Asia yang hingga sekarang dihadapkan pada masalah bahasa nasionalnya. (Habibie dalam Alwi dkk., 2000:1—4).

Sejalan dengan pendapat Habibie, Wahyudin berpendapat bahwa banyak negara di Asia dan Eropa, bahkan Amerika yang tidak memiliki bahasa nasional. Malahan, di antara beberapa bahasa etnis mereka saling bertikai karena merasa bahasa daerahnyalah yang pantas menjadi bahasa nasional. Wahyudin mencontohkan Filipina, yang sejak merdeka tahun 1946 hingga 1972, Filipina mengambil bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi kenegaraan, bukan Bahasa salah satu etnis mereka. Kemudian, negeri itu memilih bahasa “Pilipino” (dengan huruf “P” berdasarkan bahasa Tagalog) sebagai bahasa nasional dan ternyata kurang berkenan di hati rakyatnya. Tahun 1973, Majelis Konstituante Filipina menetapkan bahasa “Filipino” (dengan huruf “F”) sebagai bahasa nasional dan bahasa tersebut didasarkan pada semua bahasa daerah di Filipina. Adapun bahasa resmi kenegaraannya, Filipina memilih bahasa Inggris. [https://www.kompasiana.com/.../konflik-pemilihan-bahasa-nasional\\_550df79081331\(Diakses\\_7/12/2017\)](https://www.kompasiana.com/.../konflik-pemilihan-bahasa-nasional_550df79081331(Diakses_7/12/2017))

Contoh negara lain yang mengalami konflik hanya karena berebut bahasa nasional adalah India. Di antara bahasa Hindi, bahasa Benggali, dan bahasa Tamil tidak ada yang mau mengalah, dan mau mempersilakan bahasa mayoritasnya menjadi bahasa nasional. Akhirnya, India memilih bahasa Inggris sebagai bahasa negara karena telah menjadi *lingua-franca* di jazirah India. Untuk meredam gejolak, India mengakomodasi bahasa nasional lebih dari satu, yaitu bahasa Hindi, bahasa Benggali, bahasa Tamil, dan bahasa Malayalam.

Masalah kebahasaan di negara kecil Singapura juga hingga kini belum selesai. Singapura memiliki tiga etnis utama, yaitu Cina, India, dan Melayu. Singapura akhirnya memilih satu bahasa nasional, yaitu bahasa Melayu dan empat bahasa resmi negara, yaitu bahasa Melayu, bahasa Hindi, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Akan tetapi, dalam praktiknya penggunaan bahasa Inggris lebih dominan. Jadi, Bahasa nasional mereka akhirnya bukanlah berasal dari salah satu Bahasa dari etnis yang ada di sana. ([https://www.kompasiana.com/.../konflik-pemilihan-bahasa-nasional\\_550df79081331\(Diakses\\_7/12/2017\)](https://www.kompasiana.com/.../konflik-pemilihan-bahasa-nasional_550df79081331(Diakses_7/12/2017)))

Amerika Serikat baru menentukan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi negara pada 18 Mei 2006. Suara pun terbelah antara yang menyetujui bahasa Inggris sebagai bahasa nasional berjumlah 64 orang daripada yang tidak menyetujui 34 orang. Urutan kedua adalah bahasa Spanyol karena memang kantong-kantong etnis Spanyol banyak tinggal di Amerika, dan urutan ketiga adalah bahasa Jerman. Perjuangan menentukan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional dimulai sejak 1981. Banyak warga AS menginginkan kemajemukan bahasa diwadahi, seperti kemajemukan etnik dan budaya.

Sementara Belgia di Eropa dan dikenal sebagai markas besar NATO-nya dikoyak ketegangan berkelanjutan akibat penggunaan bahasa. Problematika itu menjadi persoalan serius mengancam disintegrasi bangsa dan sering menumbangkan rezim berkuasa. Belgia memiliki tiga bahasa dominan, yakni bahasa Belanda, Prancis, dan minoritas Jerman. Pengguna bahasa Belanda merupakan mayoritas, dan disusul bahasa Prancis, dan bahasa minoritas

Jerman. [https://www.kompasiana.com/.../konflik-pemilihan-bahasa-nasional\\_550df79081331\(Diakses 7 /12/ 2017\)](https://www.kompasiana.com/.../konflik-pemilihan-bahasa-nasional_550df79081331(Diakses 7 /12/ 2017))

Pasal 28 UU RI No. 24/2009 menegaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Tampak dengan jelas, pasal ini mengandung harapan yang tinggi karena undang-undang ini menempatkan bahasa Indonesia di tempat yang sangat terhormat. Pidato Presiden-Wakil Presiden di luar negeri pun wajib menggunakan bahasa Indonesia. Namun, pasal ini mengandung tantangan yang tidak sedikit. Lihat saja pidato SBY di PBB atau dalam sidang G-7 atau Sidang AFEC di Bali atau di *Bali Democracy Forum*, beliau menggunakan bahasa Inggris. Kalau bangsa ini konsisten dan hukum tidak pandang bulu, SBY yang notabene menandatangani undang-undang ini melanggar kebijakannya sendiri. Jika, sekali lagi, kita beranalogi pada

Undang-Undang Lalu Lintas, SBY layak ditilang, oleh aparat penegak hukum, mengapa Anda melanggar undang-undang yang Anda tanda tangani.

Pasal 35, Ayat (1) bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Artinya, dalam dunia akademik, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi wajib menggunakan bahasa Indonesia, sekali lagi **wajib** menggunakan bahasa Indonesia walaupun skripsi dari Prodi Bahasa Korea, atau Prodi Bahasa Jepang, atau Prodi Bahasa Mandarin, atau Prodi Bahasa Inggris di Indonesia. Ayat ini juga memiliki tantangan yang memerlukan kearifan dari para pengelola pendidikan tersebut.

### **Kebijakan Bahasa**

Agar pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra pada Era Globalisasi memperoleh hasil yang maksimal, Badan Bahasa menyusun langkah dan strategi yang disebut "Kebijakan Bahasa". Berdasarkan "Kebijakan Bahasa" itu, diciptakanlah berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang harus dilaksanakan oleh pegawai Badan Bahasa di Jakarta dan pegawai Balai Bahasa serta Kantor Bahasa yang jumlahnya sama dengan jumlah provinsi, yaitu 34 buah, yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia.

Kebijakan bahasa, yang biasa pula disebut dengan Politik Bahasa Nasional, adalah kebijakan nasional yang berisi pengarah, perencanaan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Keseluruhan masalah itu merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa dan sastra Indonesia, (2) masalah bahasa dan sastra daerah, dan (3) masalah bahasa asing di Indonesia.





Kemudian, dalam UURI No. 24/2009, Pasal 36, Ayat (3) dinyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Dalam hubungan dengan Pasal 36, Ayat (3) itu, Kepala Badan Bahasa, Prof. Dr. Dadang Sunendar, menyatakan ... *kalau ada spanduk yang berbahasa Inggris bisa diturunkan*. Beliau menilai ruang publik di Tanah Air masih banyak dipenuhi bahasa asing yang tidak semestinya dipicu pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Ia memberi contoh salah satu daerah yang ruang publiknya banyak menggunakan bahasa asing adalah Bali.

"Bukan bahasa asing tidak boleh, tetapi publik digiring lebih banyak memakai bahasa asing," kata Kepala Badan Bahasa di Padang, beberapa minggu yang lalu.

Menurut dia, jika ada yang ingin menggunakan bahasa asing di ruang publik ada tempatnya dan urutannya bahasa Indonesia dulu dengan ukuran lebih besar, kemudian bahasa daerah, baru di bawahnya bahasa asing.

"Bahasa negara harus diutamakan di ruang publik mulai nama jalan, nama bangunan, lembaga pendidikan, merek dagang dan lainnya, dan ini merupakan aturan undang-undang."

Ada juga nama-nama instansi resmi pemerintahan atau program publik yang memakai bahasa asing. Umpamanya, *Car Free Day* padahal ada padanan bahasa Indonesianya, yaitu Hari Tanpa Kendaraan Bermotor. Juga *Traffic Management Centre* (TMC) di Kepolisian Indonesia, padahal bisa diubah menjadi bahasa Indonesia, Pusat Tata Kelola Lalu Lintas.

Contoh lain adalah kata *launching* yang sangat sering menggusur kata "peluncuran", terkhusus bagi kepentingan bisnis. Juga untuk program-program promosi di pusat-pusat perbelanjaan, dan sebagainya.

Dadang mengakui merasa khawatir, orang Indonesia tidak bangga dan kurang mencintai bahasa sendiri dan lama-lama bisa lebih suka pakai bahasa asing. "Ini terjadi akibat selama ini aspek bahasa kurang diperhatikan oleh pemerintah. Jokowi lebih fokus pada terorisme, narkoba, radikalisme, saracen, anti-Pancasila, anti-NKRI,

intoleran, sedangkan masalah bahasa betul-betul dianaktirikan. Padahal, dia diangkat oleh rakyat untuk melindungi semua kekayaan rakyat, termasuk bahasa, dan bukan hanyapresiden bagi infrastruktur. "Jangan sampai bahasa Indonesia hilang di negeri sendiri," kata Dadang Sunendar.

Dalam upaya memperkuat pengutamaan bahasa Indonesia, khususnya di ruang publik, pihaknya akan mengusulkan Perda dan Pergub penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Perda dan pergub juga bertujuan untuk melestarikan bahasa daerah di berbagai daerah, yang juga semakin lama makin berkurang penuturnya. "Jadi, nanti kita dorong pemerintah provinsi agar membuat Perda atau Pergub," katanya. Adapun daerah yang sudah terlebih dahulu memiliki Perda bahasa, kata dia, adalah Provinsi Sumatra Barat, Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pembangunan Provinsi Banten, Cepi Safrul Alam, mendukung dan mendorong upaya pembuatan Perda atau Pergub guna memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang digagas Kantor Bahasa Provinsi Banten. Kata Cepi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar khususnya di kalangan remaja semakin berkurang, malah yang lebih berkembang adalah bahasa gaul dan bahasa alay.

"Sekarang ini, di kalangan anak muda muncul bahasa aneh-aneh. Ada istilah *baper*, *alay*, *kepo*, *rempong*, *zaman now*, *bikes*, dan lainnya. Bahkan, pejabat juga bahasanya sudah seperti itu," kata Cepi.

### **Penggunaan Bahasa Asing yang Keliru**

Pengaruh globalisasi terasa makin melanda Indonesia dalam segala hal. Bahasa Indonesia diperkirakan makin terancam dengan derasnya pengaruh bahasa Inggris dalam era globalisasi ini. Bahkan, pada tahun 2020 pada saat AFTA diberlakukan, boleh jadi alat komunikasi antarwarga di Indonesia, terutama di perkotaan, bukan lagi bahasa Indonesia, melainkan bahasa Inggris jika para pakar bahasa Indonesia tidak mengantisipasinya.

Sudah terlihat gejala bahwa di alam globalisasi ini banyak orang Indonesia yang lebih menghargai bahasa asing daripada menghargai bahasanya sendiri. Mereka beranggapan bahwa penggunaan bahasa asing akan mengangkat citra pemakainya. Mereka mengira bahwa penggunaannya akan dianggap berwawasan luas dan lebih modern.

Kemudian, Pasal 38, Ayat (1), Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Kedua ayat di atas paling banyak tantangannya karena pemilik apartemen, penghuni kompleks perdagangan, dan pemilik merek dagang lebih senang memilih bahasa Inggris untuk nama dunia usahanya karena dianggap berprospek menjanjikan. Sebenarnya, undang-undang ini memberi kelonggaran dan mempersilakan dunia usaha untuk menggunakan bahasa Inggris, tetapi harus didahului dengan bahasa Indonesia di atasnya dengan ukuran lebih besar. Misalnya:



**Balai Sidang**  
**Jakarta** *Jakarta Convention*  
*Center*

Nama asing yang digunakan untuk badan usaha, kawasan, dan bangunan perlu dilengkapi dengan padanannya dalam bahasa Indonesia.

**Tepian Danau Bogor**  
*Bogor Lakeside*

Badan Pengembangan dan Pembinaan (BPP) Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meyerukan penertiban penggunaan bahasa asing di ruang publik, seperti, nama gedung, fasilitas publik, dan rambu petunjuk jalan.

Kata asing dalam tajuk acara radio dan televisi serta dalam surat kabar dan majalah sudah “mengusir” bahasa pribumi. Padahal, kata asing tersebut sudah mempunyai padanannya dalam bahasa Indonesia. Mari kita lihat contoh berikut.

*Who wants to be a Millionaire; Pos Sore News and Talk; In Dangdut; Hot Shot; Metro This Morning; Market Review; Metro Hit List; Today's Dialogue; Headline News; Musik MTV Most Wanted; MTV Present; Musik MTV Connect; Country Road; Talk Show Campur-Campur; Talk Show Pro dan Kontra; Video Fashion News.*

Kata-kata berikut juga sering digunakan dalam penggunaan sehari-hari, yaitu *lawyer, break, job order, capital gain, miasleading, common sense, money politics, coming from behind, magic square (Sudirman Square, Palembang Square, Blok M Square), planning, flashback, goodwill*, yang menyiratkan seakan-akan bahasa Indonesia tidak mampu mengungkapkan konsep tersebut.

Perhatikan penggunaan bahasa asing yang menggelikan.



You can "do it",  
if you "know it"  
n "Execute it"

Original From Author  
of [artikel100kata.com](http://artikel100kata.com)





**Contoh Jobs Advertisement (Iklan Lowongan Pekerjaan)**



*Needed immediately secretary to work in the company PT.Fujianto21-chikafe, termsandcriteriaasfollows:*

1. *GraduatesS2*
2. *BachelorofComputers*
3. *Can communicate well*
4. *Age20-25years*
5. *Female*

*Our company, chikafe street no 21, Cirebon, West Java. more info contact 02133354*

Mengapa contoh-contoh di atas disebut menggelikan? Lihat saja contoh (1) *seefoot*. Iklan ini ditulis oleh orang yang tidak belajar bahasa Inggris. Untuk apa kita disuruh ‘melihat (*see*) dan ‘kaki’ (*foot*). Kaki siapa yang dilihat?. Padahal, maksud sebenarnya adalah *sea food* ‘ikan laut’. Contoh (2) juga menggelikan karena ada frasa *n Execute it*, mungkin maksudnya *and execute it*. Contoh (3), (4), dan (5) semuanya dapat diindonesiakan. Kata Kepala Balai Bahasa Jawa Barat, Drs. Abdul

Khak, mengapa pelanggan asing yang hanya 5% mengunjungi daerah pariwisata lebih dihormati dengan menggunakan bahasa asing daripada pengunjung domestik yang 95%. Ada juga yang berseloroh, mengapa tempat pangkas rambut di pinggir jalan becek di bawah rumpun bambu yang banyak nyamuknya diberi nama *Barber Shop*, padahal tidak mungkin ada orang asing yang mau memangkas rambutnya di sana. Bahkan, tidak akan ada seorang asing pun yang melewati gang becek yang banyak nyamuk tersebut.

"Pengutamaan bahasa negara merupakan bagian dari literasi kewarganegaraan sepanjang hayat," kata Kepala BPP Bahasa Kemendikbud Dadang Sunendar dalam kegiatan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik yang diselenggarakan di GORSoemantri Brodjonegoro, Jakarta, Rabu (10/5).

Menurut Dadang, ruang publik menjadi barometer komitmen warga dalam menjaga martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Menurutnya, butuh upaya pengendalian sesuai dengan amanat konstitusi. Tujuannya, untuk meningkatkan kesadaran dan kerja sama semua pihak. Ia mengatakan, BPP Bahasa mengapresiasi sikap Pemprov DKI Jakarta yang mengubah penyebutan Proyek Semanggi *Interchange* menjadi Proyek Simpang Susun Semanggi. Menurutnya, hal tersebut merupakan praktik baik pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik.

Kemendikbud mengajak masyarakat untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kemendikbud mengajak pemerintah daerah untuk dapat berperan lebih aktif dalam menertibkan penggunaan bahasa asing dan mengutamakan penggunaan bahasa negara. Mereka juga menyatakan janji, pertama, tetap setia dan bangga mengutamakan bahasa negara, bahasa Indonesia, di ruang publik. Kedua, ikut serta menjaga kelestarian bahasa daerah sebagai pendukung kukuhnya bahasa negara. Ketiga, siap menertibkan penggunaan bahasa asing demi kemajuan bahasa negara.

Dalam Kebijakan Bahasa, Badan Bahasa menciptakan sejumlah kegiatan kreativitas yang bertujuan memupuk dan menumbuhkan kreativitas generasi muda. Inilah beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh dunia pendidikan, baik tingkat sekolah maupun tingkat perguruan tinggi.

- 1) Bengkel Bahasa dan Sastra;
- 2) Musikalisasi Puisi;
- 3) Sayembara Kebahasaan;
- 4) Sayembara Kesastraan;
- 5) UKBI;
- 6) BIPA;
- 7) Kerja Sama Regional dan Internasional.

1) **Bengkel Bahasa dan Sastra** diselenggarakan dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra, baik di Badan Bahasa Jakarta maupun di Balai Bahasa dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia. Bahkan, Badan Bahasa menganjurkan kepada lembaga pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan serupa. Bengkel Bahasa dan Sastra adalah suatu kegiatan yang secara khusus menampung pertanyaan kebahasaan dan kesastraan dari pengunjung. Pada kegiatan itu

disiapkan tenaga penyuluh bahasa dan sastra yang andal yang mampu mengatasi dan menjawab semua pertanyaan yang muncul dari pengunjung.

2) **Musikalisasi Puisi** adalah pembacaan puisi yang diiringi oleh instrumen musik, seperti angklung, gitar, kecapi, piano, genderang, dan tetabuhan lain. Musikalisasi juga diselenggarakan dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra di seluruh Indonesia. Diharapkan pula, semua tingkat pendidikan di Tanah Air, seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta ikut menyelenggarakan kegiatan itu.

3) **Sayembara Kebahasaan**, seperti Sayembara Penulisan Proposal Penelitian, Sayembara Penulisan Esai Kebahasaan, Kuis Kebahasaan, dan Sayembara Pidato biasanya dilaksanakan dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra.

4) **Sayembara Kesastraan**, seperti Sayembara Penulisan Cerpen, Sayembara Penulisan Novel, Sayembara Penulisan Puisi, Sayembara Penulisan Drama, dan Sayembara Berbalas Pantun juga biasa dilaksanakan pada bulan Oktober dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra setiap tahun. Tantangannya adalah bahwa belum semua sekolah di berbagai tingkatan di Indonesia dapat menyelenggarakan Bulan Bahasa pada bulan Oktober setiap tahun.

#### 5) **Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)**

UKBI merupakan alat uji untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia. penutur bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan dan Pemasayarakatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemahiran berbahasa Indonesia yang diukur berupa kemahiran berbahasa Indonesia lisan dan tulis, baik yang bersifat reseptif maupun produktif. Sementara itu, penutur bahasa Indonesia yang dimaksud adalah penutur asli yang merupakan orang atau warga negara Indonesia dan penutur asing yang merupakan warga negara asing, baik tinggal di Indonesia maupun tinggal di luar negeri. UKBI dapat digolongkan ke dalam jenis tes kemahiran (*proficiency test*) untuk tujuan umum (*general purpose*). Sebagai sebuah tes kemahiran, UKBI mengacu pada situasi penggunaan bahasa Indonesia yang sesungguhnya dihadapi oleh peserta uji dalam kehidupan berbahasa sehari-hari. Kriteria yang diacu oleh UKBI berupa penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan nyata penutur bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa ranah komunikasi yang merujuk pada ranah kecakapan hidup umum, yaitu ranah sintas (*survival*) dan ranah kemasyarakatan (sosial) serta ranah kecakapan hidup khusus, yaitu ranah keprofesian (vokasional) dan ranah keilmiah (akademik).

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan putusan No. 152/U/2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Tujuannya adalah untuk kemampuan kemahiran berbahasa Indonesia di kalangan masyarakat dapat ditentukan dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

UKBI disusun dan dikembangkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Butir ketiga Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 berbunyi “Kami putra dan putri Indonesiamenjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Kebulatan tekad para pemuda itu disusul oleh putusan politik dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XV, Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia.

### **Urutan Materi Uji dalam Panduan UKBI**

- 1) Seksi I berisi pemahaman isi dengarannya yang terdiri atas 50 soal, yang disajikan selama 30 menit.
- 2) Seksi II berisi pemahaman kaidah bahasa atau struktur bahasa yang terdiri atas 45 soal, yang disajikan selama 35 menit.
- 3) Seksi III berisi pemahaman kosakata dan isi bacaan yang terdiri atas 55 soal dan disajikan selama 55 menit.

### **Pemeringkatan UKBI**

Sebagai bahan kajian, perlu diungkapkan tafsiran ketujuh predikat yang ada di dalam UKBI. Tafsiran ini memberi pemahaman pada capaian peserta uji.

1. Predikat Istimewa
2. Predikat Sangat Unggul
3. Predikat Madya
4. Predikat Semenjana
5. Predikat Marginal
6. Predikat Terbatas

### **UKBI Menyikapi masuknya Budaya Asing**

Pada era globalisasi yang diikuti dengan berkembangnya pasar bebas di dunia Internasional juga merambah negara Indonesia. Di zaman sekarang ini sudah semakin banyak perusahaan dan berbagai produk asing yang beredar luas di negara ini. Begitu pula dengan tenaga kerja yang saat ini semakin banyak berdatangan dari berbagai negara, mulai dari para petinggi hingga buruh, dan pedagang eceran yang berasal dari bangsa asing.

Masuknya produk-produk dan tenaga kerja asing dari berbagai negara, tentu memberikan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Tidak dapat dimungkiri terjadinya persaingan antara produk dan tenaga kerja lokal dan produk dan tenaga kerja asing yang dianggap lebih berkualitas. Hal ini diperparah lagi dengan semakin longgarnya persyaratan dan aturan yang ditetapkan pemerintah terhadap bangsa asing. Keadaan seperti inilah yang membuat posisi pribumi semakin tersisihkan. Untuk mengatasi itu semua, pemerintah Indonesia menyelenggarakan program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA). Program ini diperuntukkan bagi para penutur asli bahasa asing yang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia yang diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

### **6) Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)**

Era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu dahsyat menuntut para pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja lebih keras untuk lebih menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Featherston (dalam Lee, 1996) globalisasi menembus batas-batas budaya melalui semakin luasnya komunikasi, dan meningkatnya orang asing yang datang ke Indonesia.



Melihat perkembangan bahasa Indonesia di dalam negeri yang cukup pesat, perkembangan di luar negeri pun sangat menggembirakan. Data terakhir menunjukkan setidaknya ada 52 negara asing telah membuka program bahasa Indonesia (*Indonesian Language Studies*). Bahkan, perkembangan ini akan semakin meningkat setelah terbentuk Badan Asosiasi Kelompok Bahasa Indonesia Penutur Asing di Bandung tahun 1999. Walaupun perkembangan bahasa Indonesia semakin pesat di satu sisi, di sisi lain peluang dan tantangan terhadap bahasa Indonesia semakin besar pula. Berbagai peluang bahasa Indonesia dalam era globalisasi ini antara lain adanya dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk peran media massa.

Tujuan pembelajaran BIPA memiliki kaitan yang erat dengan masalah pemenuhan kebutuhan. Sejalan dengan masalah ini, Mackey dan Mountford (dalam Sofyan: 1983) menjelaskan bahwa ada tiga kebutuhan yang mendorong seseorang belajar bahasa, yakni (1) kebutuhan akan pekerjaan, (2) kebutuhan program latihan kejuruan, dan (3) kebutuhan untuk belajar. Sesuai dengan pendapat itu, Hoed (1995) menyatakan bahwa program BIPA bertujuan untuk (1) mengikuti kuliah diperguruan tinggi Indonesia, (2) membaca buku dan surat kabar guna keperluan penelitian, dan (3) berkomunikasi secara lisan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Ketiga tujuan itu masing-masing masih dapat diperluas lagi menjadi beberapa tujuan khusus, misalnya untuk mengikuti kuliah di perguruan tinggi Indonesia memerlukan pengetahuan bahasa Indonesia sesuai dengan bidang ilmu yang diikuti (ilmu sosial, ilmu teknik, ekonomi, dan sebagainya). Begitu pula untuk keperluan penelitian tergantung dari bidang apa yang akan diteliti. Untuk belajar bahasa Indonesia lisan guna keperluan komunikasi penduduk diperlukan pula pengkhususan, misalnya komunikasi formal dan informal.

Pembelajaran BIPA memiliki karakteristik dan norma pedagogik yang berbeda dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada penutur asli. Perbedaan tersebut terjadi karena (a) pelajar BIPA pada umumnya telah memiliki jangkauan dan target hasil pembelajaran secara tegas, (b) dilihat dari tingkat pendidikannya, pada umumnya pelajar BIPA adalah orang-orang terpelajar, (c) para pelajar BIPA memiliki gaya belajar yang khas dan kadang-kadang didominasi oleh latar belakang budaya, (d) sebagian besar pelajar BIPA memiliki minat, dan motivasi yang tinggi terhadap bahasa Indonesia, (e) para pelajar BIPA memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, dan (f) karena perbedaan sistem bahasa, menyebabkan pelajar BIPA banyak menghadapi kesulitan terutama dalam masalah pelafalan dan penulisan (Suyitno 2000).

### **Strategi Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing**

Strategi pengajaran BIPA lebih menekankan pada penggunaan bahasa daripada menjelaskan tata bahasa. Guru dalam pembelajaran lebih banyak memfungsikan dirinya sebagai mitra bicara bagi siswanya. Dalam hal ini, guru memberikan latihan pemakaian bahasa untuk berkomunikasi. Untuk itu, meteri pembelajaran diwujudkan dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dalam

pembelajaran BIPA, bahasa Indonesia ditempatkan sebagai alat komunikasi, bukan sebagai materi bahasa yang dilafalkan atau dianalisis. Bahasa Indonesia difungsikan sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulis. Oleh karena itu, dalam pembelajaran BIPA, tujuan yang ingin dicapai adalah kemampuan pelajar untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dipelajarinya. Dengan demikian, pelajar diharapkan dapat memiliki kemampuan komunikatif, sejalan dengan harapan tersebut, dalam pembelajaran BIPA, ditekankan kepada pelajar BIPA tentang (1) pengetahuan tentang bentuk bahasa yang mungkin dikatakan, (2) pengetahuan tentang kata yang akan dituturkan dan dapat dipahami oleh pendengar, (3) pengetahuan tentang kata yang sesuai dan wajar menurut konteksnya, dan (4) pengetahuan tentang kata yang pernah diucapkan orang. Dengan penguasaan keempat hal tersebut, seseorang dapat berbahasa secara berterima.

Lebih lanjut, Richard dan Rodgers (1986) menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan belajar bahasa ancangan komunikatif mengajukan tiga prinsip, yakni (1). belajar bahasa terjadi apabila kegiatan itu berlangsung dalam suatu komunikasi yang nyata, (2). dalam kegiatan komunikasi seperti ini, bahasa nyata-nyata digunakan, dan (3). penggunaan bahasa yang nyata inilah yang bagi pelajar bermakna sekaligus fungsional. Dengan situasi yang demikian ini, prinsip komunikasi di kelas ataupun di luar kelas dapat diterapkan dalam keterpaduan keterampilan dengan adanya kesenjangan informasi, transfer informasi, adanya umpan balik, dan negosiasi serta koreksi pada informasi.

### **Kerja Sama Regional dan Internasional**

#### **a. Program Kerja Sama Regional**

Badan Bahasa menyelenggarakan kerja sama secara regional dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerja sama itu berupa, antara lain Mabbim dan Mastera.

- a. Mabbim (Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia, sekarang Mabbim diperluas dengan negara Singapura, Kamboja, Myanmar, dan Filipina). Mabbim sudah menyepakati pedoman umum ejaan, pedoman umum pembentukan istilah, pedoman penyerapan bahasa asing, dan menghasilkan ratusan ribu istilah dalam berbagai bidang ilmu, seperti ketatanegaraan, kedokteran, kelautan, hukum, agama, arkeologi, linguistik, aeronotika, dan lain-lain).
- b. Mastera (Majelis Sastra Asia Tenggara dengan keanggotaan yang sama dengan Mabbim). Mabbim dan Mastera menyelenggarakan sidang lengkap setiap tahun secara bergilir. Misalnya, Sidang Mabbim/Mastera tahun lalu diselenggarakan di Bali (Indonesia), tahun ini di Kualalumpur (Malaysia), dan tahun depan di Bandar Sri Begawan (Brunei Darussalam), lalu kembali lagi ke Indonesia, dan begitu seterusnya.

#### **b. Program Kerja Sama Internasional**

Tidak kurang dari 76 negara asing, seperti Jerman, Prancis, Amerika, RRC, Korea, Jepang, dan Australia membuka Jurusan Bahasa Indonesia di negara mereka. Tujuannya adalah agar generasi muda di negara-negara

tersebut bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia. Selain itu, diusahakan juga agar generasi muda di negara mereka memahami dan mengenal kebudayaan yang hidup di Indonesia. Di 76 negara asing tersebut, pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) telah dilakukan, dengan 179 lembaga penyelenggara. Lembaga tersebut, misalnya perguruan tinggi, KBRI, pusat-pusat kebudayaan, sekolah Indonesia di luar negeri dan lembaga kursus lainnya. Itu menjadi peluang besar bagi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional.

Pada tahun 2017 Badan Bahasa telah mengirimkan tenaga penyuluh bahasa ke berbagai negara untuk mengajar di sana selama empat bulan, dengan biaya kerja sama Badan Bahasa dengan negara tujuan. Misalnya, ada tenaga yang mengajar di Al-Azhar, Kairo, ada yang bertugas di Universitas Tokyo, Universitas Beijing, Universitas Han Kuk, dan Universitas Melbourne.

### **Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Pasal 41, Ayat (1) Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman.

Pengembangan bahasa adalah upaya untuk membuat kodifikasi bahasa, yang melahirkan berbagai buku acuan kebahasaan dan kesastraan, seperti *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, *Pedoman Umum Penyerapan Kata/Istilah Asing*, *Pedoman Istilah Sastra*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Glosarium Istilah* (berbagai bidang ilmu), dan berbagai kamus praktis untuk pelajar dan mahasiswa. Di samping itu, penyusunan Undang-Undang Bahasa dan kegiatan penelitian aspek-aspek kebahasaan dan kesastraan, seperti penelitian bidang fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan semantik termasuk ke dalam kelompok pengembangan bahasa.

Adapun pembinaan bahasa adalah upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada segenap lapisan masyarakat. Pembinaan dilakukan melalui penyuluhan dan penataran bagi berbagai kalangan, seperti siswa, mahasiswa, pegawai Pemda, para lurah, para camat, pegawai Kehakiman, pegawai Kejaksaan, pegawai Kementerian Sosial, pegawai Kementerian Koperasi dan UKM, pegawai Kementerian Sekretariat Negara, dan lain-lain.

Peserta penyuluhan bahasa diajak oleh para penyuluh untuk melafalkan kata yang benar, misalnya lafal yang benar bagi No. HP adalah Nol Delapan Satu Lima Satu Enam Nol Dua Delapan Nol Lima, dan bukan Kosong Delapan Satu Lima Satu Enam Kosong Dua Delapan Kosong Lima (HP 08151602805). Kemudian, lafal yang benar *kecap ABeTje* (ABC), dan bukan *kecap ABeSe*, lafal yang benar *pastjapanen* (*pascapanen*), *pastjapemilu*, *pastjasarjana*, dan bukan *paskapanen*, *paskapemilu*, dan *paskasarjana*. Penulisan yang benar *pertanggungjawaban*, dan bukan *pertanggung jawaban*.

Kemudian, dan suatu penyuluhan Bahasa, si penyuluh mengajak para pesuluh agar tidak ada kalimat yang disusun, seperti *Ibu-ibu yang membeli ayam di pasar harus diikat kakinya supaya tidak bergerak-gerak*. Silakan Anda perbaiki.

Jangan pula ada kalimat yang disusun, seperti *Mayat yang ditemukan di dekat Danau Sunter sering terlihat mondar-mandir naik motor di sekitar danau*.(Salah).Silakan Anda perbaiki.

#### **Kesalahan Lafal dan Ejaan**

1. Hubungi kami di (021) 7320824 (kosong dua satu tujuh tiga dua kosong delapan dua empat)
2. Hubungi Ponsel 08151622855 (kosong delapan satu lima satu enam dua dua delapan lima lima)
3. Ibu Ir. HARDAYANI, MT
4. Bapak Prof. DR. M. Husin, SH, MSc

#### **Lafal dan ejaan yang benar sebagai berikut.**

1. Hubungi kami di (021) 7320824 (nol dua satu tujuh tiga dua nol delapan dua empat)
2. Hubungi Ponsel 08151622855 (nol delapan satu lima satu enam dua dua delapan lima lima)
3. Ir. Hardayanti, M.T. atau Ibu Hardayanti, M.T.
4. Prof. Dr. M. Husin, S.H., M.Sc. atau Bapak M. Husin, S.H., M.Sc.

#### **Kebijakan dalam Pembentukan kata**

Kata dasar yang berawal konsonan *k, p, t, s* harus luluh jika mendapat awalan *meng-*. Silakan Anda membentuk kata dengan menggunakan imbuhan *meng-*, *meng-kan*, *meng-i*, *peng-*, atau *peng-an*. Misalnya: *Koordinasi* ditambah *meng-* tidak menjadi *mengkoordinasi*, tetapi menjadi *mengordinasi*. *Kilat* ditambah *meng-kan* tidak menjadi *mengkilatkan*, tetapi menjadi *mengilatkan*. *Kilap* ditambah *meng-* tidak menjadi *mengkilap*, tetapi menjadi *mengilap*. *Kalkulasi* ditambah *meng-* tidak menjadi *mengkalkulasi*, tetapi menjadi *mengalkulasi*. *Target* ditambah *meng-* tidak menjadi *mentargetkan*, tetapi menjadi *menargetkan*. *Sinergi* ditambah *meng-* tidak menjadi *mensinergi*, tetapi *menynergikan*. *Tabulasi* ditambah *meng-* tidak menjadi *mentabulasi*, tetapi menjadi *menabulasi*. Selanjutnya, bunyi *k, p, t, s* yang berupa gugus konsonan, seperti *kr, pr, tr, sr* dan *sp*. tidak perlu luluh jika ditambah *meng-*. *Sponsor* ditambah *meng-* menjadi *mensponsor*, bukan *menyponsori*. *Transliterasi* ditambah *meng-kan* menjadi *mentransliterasikan*, bukan *meneransliterasikan*. *Kronologis* ditambah *meng-kan* menjadi *mengkronologiskan*, bukan *mengeronologiskan*. *Proklamasi* ditambah *meng-kan* menjadi *memproklamasikan*, bukan *memeroklomasikan*.

*Spesial* ditambah *meng-kan* menjadi *menspesialkan*, bukan *menyepesialkan*.

*Produksi* ditambah *meng-* menjadi *memproduksi*, bukan *memeroduksi*.

*Praktik* ditambah *meng-kan* menjadi *mempraktikkan*, bukan *memeraktikkan*.

**Penggunaan Kata *Putusan* dan *Simpulan***

Kalau kita mencoba melihat bentukan kata yang sudah ada dan sudah lazim dalam masyarakat, seperti *tulisan*, *karangan*, *catatan*, dan *rangkuman*, ternyata morfologi kata-kata Indonesia tersebut mengikuti pola tertentu secara konsisten dan taat asas. Ambillah contoh empat kata tadi yang masing-masing berasal dari kata dasar verba *tulis*, *karang*, *catat*, dan *rangkum*. Jika keempat kata dasar itu diberi prefiks *meng-*, bentukannya menjadi *menulis*, *mengarang*, *mencatat*, dan *merangkum*, yang berarti ‘mengerjakan perbuatan *tulis*, *karang*, *catat*, dan *rangkum*’. Sekarang keempat kata tersebut diberi prefiks *peng-*, bentukannya menjadi *penulis*, *pengarang*, *pencatat*, dan *perangkum*, yang artinya ‘orang yang melakukan ‘*tulis*, *karang*, *catat*, atau *rangkum*’. Kemudian, keempat kata tadi diberi imbuhan gabung *peng-an* menjadi *penulisan*, *pengarangan*, *pencatatan*, atau *perangkuman*, yang artinya ‘proses *menulis*, proses *mengarang*, proses *mencatat*, atau proses *merangkum*’. Kini keempat verba tadi diberi akhiran *-an* menjadi *tulisan*, *karangan*, *catatan*, dan *rangkuman* yang artinya ‘yang ditulis’, ‘yang dikarang’, ‘yang dicatat’, dan ‘yang dirangkum’ atau ‘hasil menulis’, ‘hasil mengarang’, ‘hasil mencatat’, dan ‘hasil merangkum’.

Berikut dicantumkan contoh yang lain.

Pilih,	memilih,	pemilih,	pemilihan,	pilihan
Bawa,	membawa,	pembawa,	pembawaan,	bawaan
Pakai,	memakai,	pemakai,	pemakaian,	pakaian
Pukul,	memukul,	pemukul,	pemukulan,	pukulan
Putus,	memutuskan,	pemutus,	pemutusan,	putusan
Simpul,	menyimpulkan,	penyimpul,	penyimpulan,	simpulan
Ringkas,	meringkas,	peringkas,	peringkasan,	ringkasan
Capai,	mencapai,	peencapai,	pencapaian,	capaian
Layan,	melayani,	pelayan,	pelayanan,	layanan

**Contoh Penggunaan**

- 1) Karya ilmiah harus mengandung bab pendahuluan, analisis dan kesimpulan. (Salah)
- 1 a) Karya ilmiah harus mengandung bab pendahuluan, analisis, dan simpulan. (Benar)
- 2) Sesuai dengan keputusan pemerintah, bea masuk barang mewah dinaikan menjadi 20%. (Salah)
- 2 a) Sesuai dengan putusan pemerintah, bea masuk barang mewah dinaikan menjadi 20%. (Benar)
- 3) Paman saya sudah membeli rumah di pemukiman Puri Giri Indah. (Salah)
- 3 a) Paman saya sudah membeli rumah di permukiman Puri Giri Indah. (Benar)

**Kesalahan Kalimat dan Pernalaran**

1. Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan

- ini tepat pada waktunya.
2. Bagi yang membawa HP harap dimatikan.
  3. Yang membawa barang berharga harap dititipkan kepada petugas kami.

**Kalimat dan pernalaran yang benar sebagai berikut.**

1. Saya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena dapat menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya.
2. Mohon HP Bapak/Ibu dimatikan.
3. Barang berharga harap dititipkan kepada petugas kami.

**DI SINI 9/12**

**Perencanaan dan Pemodernan Bahasa**

Moeliono (1982:1) menyatakan bahwa perencanaan bahasa (*language planning*) atau menurut Alisjahbana (1967) *language engineering* ialah usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Upaya itu meliputi pembuatan tata ejaan yang normatif, penyusunan tata bahasa dan kamus yang akan menjadi pedoman bagi penutur dan penulis di dalam masyarakat yang tidak homogen, termasuk penerjemahan, tergolong wilayah perencanaan bahasa. (Moeliono dalam Alwi dkk., 2000:27).

Menurut Moeliono (dalam Alwi dkk., 2000:27) pula, upaya perencanaan bahasa tidak perlu mengubah segala-galanya. Yang sudah baik dapat dipertahankan, yang belum baik harus disempurnakan. Perencanaan bahasa beserta pelaksanaannya, yang diusahakan pada taraf nasional, memerlukan dukungan nyata dari pihak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Moeliono dalam Alwi dkk., 2000:27).

Pemodernan bahasa Indonesia adalah upaya pemutakhiran bahasa Indonesia sehingga serasi dengan keperluan komunikasi di berbagai bidang kehidupan, seperti industri, teknologi, dan pendidikan lanjutan. Pemodernan bahasa juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang bertaraf sederajat secara fungsional dengan bahasa-bahasa lain yang lazim disebut bahasa terkembang yang sudah mantap. Misalnya, upaya penerjemahan ilmu dan teknologi Barat ke dalam bahasa Indonesia juga termasuk wilayah pemodernan bahasa (Sumarjan 1998:8).

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) edisi IV tahun 2013 memuat 102.000 kata. Dalam rentang waktu hanya 4 tahun kosakata Indonesia bertambah 3.000 buah. Ini merupakan perkembangan yang sangat pesat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabnya adalah karena sejak kebijakan bahasa berkiblat ke Inggris (1970-an), kita lebih banyak menyerap kata dari bahasa dunia itu ke dalam bahasa Indonesia. Dalam edisi III KBBI tahun 2013 terdapat lebih dari 100.000 entri atau lema. Sekarang dalam bahasa kita terdapat kata serapan yang sudah menjadi warga Indonesia, seperti *interferensi*, *intervensi*, *inovasi*, *akselerasi*, *invensi*, *real estat*, *mal*, *ekspektasi*, *akseptabilitas*, *akuntabilitas*, *kapabilitas*, *efektivitas*, *produktivitas*, *elpiji*, *ekstrover*, *introver*, *elegan*, *multikultur*, *superordinat*, dan *asam stearat*. Kini bahasa



Indonesia menjadi kaya akan kosakata sehingga mampu mengungkapkan berbagai gagasan, baik yang ilmiah maupun nonilmiah.

### **Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional**

Ada obsesi yang memiliki tanda tanya besar dari Undang-Undang No.24/2009, yaitu Pasal 44, Ayat (1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Pasal dan ayat ini, pada hemat saya, merupakan merupakan sebuah tantangan, atau merupakan mimpi besar bagi bangsa Indonesia, yang sangat sulit dalam memperjuangkannya. Ayat ini sulit diperjuangkan karena pada saat ini, banyak orang Indonesia lebih "bangga" menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Mungkin, mereka menganggap bahwa bahasa Inggris lebih menjanjikan harapan dalam mencari pekerjaan atau dalam mencari nafkah daripada bahasa Indonesia. Bahkan, kadang-kadang beberapa orang Indonesia lebih menghargai orang asing daripada orang Indonesia sendiri. Kita harus belajar dari orang Jepang, Korea, dan Cina. Mereka menjadi negara maju dalam bidang industri karena mereka mengutamakan bahasa dan produksi mereka sendiri. Di Jepang, nama toko, bangunan, tempat hiburan menggunakan bahasa Jepang. Di Korea nama-nama tersebut menggunakan bahasa Korea. Demikian juga di Cina. Ketiga negara itu kini menjadi saingan berat bagi Amerika dalam perekonomian global. Lalu, mengapa akhirnya bahasa Arab menjadi bahasa dunia. Jika dirunut dari asal-mulanya adalah kira-kira tahun 1980-an Presiden Palestina yang paling berani, Yasser Arafat berpidato di depan Sidang Umum PBB menggunakan bahasa nasionalnya, bahasa Arab. Beliau berpidato penuh semangat dan berapi-api sambil menggebrak meja, mengecam politik luar negeri Amerika Serikat yang mendukung negara Yahudi Israel. Sejak kejadian fenomenal itulah pemimpin-pemimpin dunia mempertimbangkan Bahasa Arab menjadi Bahasa di Forum PBB.

Bahasa Indonesia akan mampu menjadi bahasa pengantar perdagangan bebas di bumi Indonesia pada Era Globalisasi. Upaya perluasan penggunaan bahasa Indonesia ke luar masyarakat Indonesia merupakan langkah memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional melalui peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA), yang kelak akan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas di dunia internasional.

Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional jika dimulai dari masyarakat Indonesia sendiri. Artinya, masyarakat Indonesia harus lebih mencintai bahasanya daripada bahasa asing, dan memainkan peran sebagai bahasa internasional di dalam maupun di luar negeri dalam hal ini melalui lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia, menurut Arifin dan Tasai (2013:3), setidaknya mengandung tiga ciri pokok, yaitu kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa. Menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia merupakan tujuan upaya pembinaan yang tidak boleh ditafsirkan bahwa kita dilarang menggunakan bahasa asing. Bahkan kita dianjurkan untuk menguasai dan memanfaatkan bahasa asing untuk berkomunikasi, menyerap ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan.

## **PENUTUP**

Semua pasal dan ayat “Undang-Undang Bahasa” yang dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 24/2009 tergolong bernuansa penuh harapan. Namun, pelaksanaan pelaksanaan Pembinaan Bahasa pada Era Globalisasi menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat. Bahkan, pasal dan ayat tertentu dilanggar sendiri oleh seorang Presiden yang notabene menandatangani sendiri undang-undang tersebut. Badan Bahasa mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk membuat aturan hukum berupa perda, perwako, dan pergub tentang pengendalian bahasa di ruang publik. Alasannya, Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan harus ada di ruang publik. Jangan sampai bahasa yang dirancang oleh pendiri bangsa sebagai pemersatu bangsa malah hilang begitu saja karena perilaku masyarakatnya sendiri.

## **PUSTAKA ACUAN**

- Adriana, Maria D. 2010. ”Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing”. Dalam *Semiloka Nasional Pengujian Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Alisjahbana, S.T. 1970. “Some Planning Processes in the Development of the Indonesia Malay Language.” Dalam Rubin, *et.al. Can be Language be Planned?* Honolulu: University of Hawaii Press.
- Alwi, Hasan *et al.* 2000. *Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Alwi, Hasan. 2000. “Pelestarian Bahasa Daerah”. Dalam Hasan Alwi *et al. Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Alwi, Hasan *et al.* 1995. *Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin, E. Zaenal. 2001. ”Pembinaan Bahasa pada Era Kesejagatan”. Denpasar, Bali: Kongres Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) Ke-8.
- Arifin, E. Zaenal *et al.* 1989. *Bahasa Iklan, Berita, dan Papan Reklame*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Arifin, E. Zaenal dan Farid Hadi. 2003. *Seribu Satu Kesalahan Berbahasa*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Undang-Undang No. 24 Tahun 2009*

*tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.* Jakarta: Badan Bahasa.

Djojonegoro, Wardiman. 2000. "Pemasyarakatan Bahasa". Dalam Hasan Alwi *et al. Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi.* Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

Ferguson, C.A. 1968. "Language Development." Dalam Fishman *et.al. Language Problems of Developing Nation.* New York: John Wiley and Sons. Featherston (dalam Lee). 1996. "Globalisasi Menembus Batas-Batas Budaya".

Halim, Amran. 1976. *Politik Bahasa Nasional.* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Halim, Amran. 2000. "Ragam Lisan". Dalam Hasan Alwi *et al. Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi.* Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

Haugen, E.. 1966. "*Linguistic and Language Planning.*" Dalam W. Bright (ed.). *Sociolinguistics: Proceedings of the VCLA Sociolinguistics Conference.* The Huggue: Norton.

Kridalaksana, Harimurti. 1975. "Beberapa Ciri Bahasa Indonesia Standar". dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra.* Tahun I, No. 1. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Laksono, Agung. 2000. "Sumpah Pemuda dan Jati Diri Bangsa". Dalam Hasan Alwi *et al. Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi.* Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

Mackey dan Mountford (dalam Sofyan). 1983. *Tiga Kebutuhan Belajar Bahasa.*  
**Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. Putusan No. 152/U/2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).**

Moeliono, Anton M. 2000. "Kedudukan Bahasa Indonesia". Dalam Hasan Alwi *et al. Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi.* Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

Oktovianny, Linny. 2010. "Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI): Peluang dan Tantangan". Dalam *Semiloka Nasional Pengujian Bahasa.* Jakarta: Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional.

Prawiro, Radius. 1998. "Sekapur Sirih". Dalam Sularso Sopater *et al.* (Ed.). *Pembelajaran Memasuki Era Kesejagatan.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Yance, Imelda. 2010. "Potensi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional: Peluang dan Tantangan". Dalam *Semiloka Nasional Pengujian Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional.

[https://www.kompasiana.com/.../konflik-pemilihan-bahasa-nasional\\_550df79081331](https://www.kompasiana.com/.../konflik-pemilihan-bahasa-nasional_550df79081331)(Diakses 7 /12/ 2017)

[https://www.kompasiana.com/.../konflik-pemilihan-bahasa-nasionall\\_550df79081331](https://www.kompasiana.com/.../konflik-pemilihan-bahasa-nasionall_550df79081331)  
(Diakses 7 /12/ 2017)

- \*) Makalah ini sudah disampaikan dalam Kuliah Umum Pembinaan Bahasa Indonesia ada Era Globalisasi di depan Sivitas Akademika IISIP Jakarta pada Selasa, 28 November 2017.
- \*\*\*) Penulis adalah Guru Besar Linguistik pada Fakultas Pascasarjana, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta.